

Analisis Implementasi E-Musrenbang Terhadap Perencanaan Pembangunan di Kota Surabaya dengan Pendekatan Problem Tree Analysis

Bella Nofita Ramadani*¹
Rachel Amanda Delia²
M. Noer Falaq Al Amin³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*e-mail: bella.22111@mhs.unesa.ac.id¹, rachel22138@mhs.unesa.ac.id², noerfalaqalamin@unesa.ac.id³

Abstrak

Perencanaan pembangunan merupakan salah satu proses yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sebuah daerah. Selain mengeluarkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah untuk mempercepat pembangunan daerah dan pengambilan keputusan, pemerintah juga mengeluarkan program Musrenbang yang sekarang disesuaikan dengan kemajuan zaman berkembang dengan menjadi E-Musrenbang. E-Musrenbang muncul untuk mengatasi permasalahan yang hadir dalam sistem Musrenbang konvensional. Kota Surabaya menjadi salah satu kota yang berhasil menerapkan E-Musrenbang, tapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan celah untuk melakukan peningkatan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat Surabaya dalam program E-Musrenbang. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan problem tree analysis. Hasil penelitian ini yaitu berfokus menganalisis permasalahan yang menjadi penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Surabaya di beberapa daerah. Beberapa masalah diantaranya karena kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang program E-Musrenbang, tidak semua masyarakat memiliki akses ke internet, sistem E-Musrenbang dianggap rumit dan sulit digunakan oleh kebanyakan masyarakat awam, dan terakhir yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat akan pemerintah.

Kata kunci: Analisis; E-Musrenbang; Partisipasi; Problem Tree Analysis

Abstract

Development planning is one of the important processes to improve the welfare of people in a region. In addition to issuing decentralization and regional autonomy policies to accelerate regional development and decision-making, the government also issued a Musrenbang program, which is now adapted to the progress of time to develop into E-Musrenbang. E-Musrenbang was created to overcome the problems in the conventional musrenbang system. Surabaya City is one of the cities that have successfully implemented E-Musrenbang, but in its implementation there are still gaps to be improved. The purpose of this study is to analyze the level of participation of the Surabaya community in the E-Musrenbang program. This research uses literature review and problem tree analysis methods. The results of this study focus on analyzing the problems that cause the low level of participation of the Surabaya community in several areas. Some of the problems include the lack of socialization and education about the E-Musrenbang program, not all people have access to the Internet, the E-Musrenbang system is considered complicated and difficult to use by most ordinary people, and finally the lack of public trust in the government.

Keywords: Analysis, E-Musrenbang, Participation, Problem Tree Analysis

PENDAHULUAN

Perencanaan menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kegiatan manajemen. Perencanaan sendiri secara umum bisa diartikan sebagai suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai di masa depan juga menentukan tahapan apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut (Rizkiya et al., 2023). Perencanaan memiliki fungsi untuk membantu pengambilan keputusan dalam organisasi agar efektif dan efisien. Sedangkan Pembangunan umumnya dapat diartikan

sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuan hidup berbangsa. Pembangunan sangat berkaitan dengan nilai, seringnya bersifat transendental. Pokok pikiran pembangunan berfokus pada cita-cita keadilan sosial, maka dari itu pembangunan butuh proses dan tahapan yang terukur. Tahapan itu harus bisa mencapai berbagai bidang, pertama ekonomi, sebagai tolok ukur kemakmuran materiil, kedua ada kesejahteraan sosial dan terakhir tahap keadilan sosial. Perencanaan Pembangunan sendiri dapat dimaknai sebagai suatu proses perencanaan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera.

Sesuai amanat Undang Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki 2 fungsi utama yaitu, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai asas otonomi dan juga melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat (Budi, 2010). Penyelenggaraan pemerintahan daerah ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, memberdayakan masyarakat dan mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan daerah, serta meningkatkan daya saing daerah. Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah juga harus memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, dan kekhususan dalam menjalankan tugasnya.

Untuk mempercepat pembangunan daerah dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan dan pelayanan publik menjadi lebih cepat dan sederhana pemerintah mengeluarkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi tata hubungan pemerintahan antara pusat dan daerah. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian dilakukan pembaharuan dengan dilakukannya revisi menjadi Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 (Budi, 2010).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan sistem perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan menggunakan pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up) (Hafidah et al., 2022). Perencanaan pembangunan memerlukan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat agar tujuan pembangunan tercapai. Pelaksanaan Musrenbang secara konvensional selama ini dihadapkan dengan berbagai kendala seperti kurangnya tingkat partisipasi masyarakat, kurang akuratnya data, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan usulan musrenbang, sehingga membuat program yang dijalankan kurang tepat sasaran.

Pengambilan keputusan merupakan keterampilan penting bagi pemimpin organisasi untuk menjalankan fungsinya dengan efektif. Dengan mempelajari teori dan teknik pengambilan keputusan, pemimpin dapat meningkatkan kemampuannya dalam menyelesaikan masalah dan memilih solusi terbaik bagi organisasi. Penting untuk dipahami bahwa teori pengambilan keputusan selalu didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu. Asumsi ini digunakan untuk menyederhanakan permasalahan dan memudahkan proses analisis. Namun, penting untuk mempertimbangkan keterbatasan asumsi-asumsi ini dan menyesuaikannya dengan konteks situasi yang dihadapi. George R, Terry dalam (Albaqiatussaliha, 2019) menyebutkan bahwa ada 5 dasar dalam pengambilan keputusan, yaitu intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, dan rasional.

Pengambilan keputusan rasional adalah proses memilih solusi terbaik dengan menggunakan logika dan pemikiran yang terstruktur. Proses ini melibatkan analisis situasi dan keputusan yang cermat untuk mencapai hasil yang optimal dalam batasan yang ada.

Langkah-langkah pengambilan keputusan rasional:

1. Identifikasi masalah: Definisikan dan jelaskan masalah yang dihadapi secara jelas.
2. Tetapkan kriteria: Buat daftar kriteria yang harus dipenuhi oleh solusi yang ideal.
3. Tentukan bobot kriteria: Berikan nilai bobot kepada setiap kriteria berdasarkan kepentingannya.

4. Buat alternatif solusi: Kembangkan beberapa alternatif solusi yang mungkin untuk mengatasi masalah.
5. Evaluasi alternatif solusi: Nilai setiap alternatif solusi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan bobotnya.
6. Pilih solusi terbaik: Pilih alternatif solusi yang memiliki nilai tertinggi dan paling sesuai dengan kriteria.

Prinsip-prinsip pengambilan keputusan rasional:

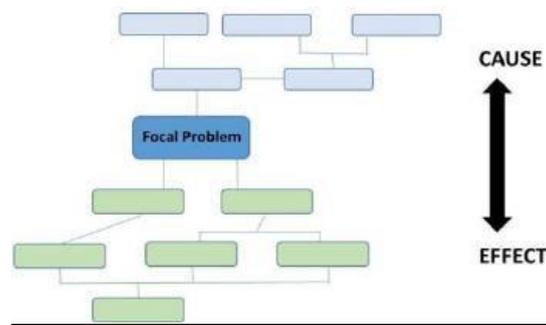
- Konsistensi: Solusi yang dipilih harus konsisten dengan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan.
- Memaksimalkan hasil: Solusi yang dipilih harus memberikan hasil yang paling optimal dalam batasan yang ada.
- Logis: Proses pengambilan keputusan harus didasarkan pada logika dan pemikiran yang terstruktur.
- Objektif: Solusi yang dipilih harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan tidak memihak.

Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah serta dengan pengambilan keputusan yang rasional, forum Musrenbang kini tidak hanya dilakukan secara manual dan formal. E-Musrenbang merupakan sebuah inovasi dalam perencanaan pembangunan yang memanfaatkan dan mengadopsi kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi (Yunas, 2017). E-Musrenbang juga menjadi menjadi wujud jadi dari penerapan konsep e-government sehingga memungkinkan masyarakat dari berbagai tingkatan untuk memberikan aspirasinya terkait pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka (Rafinzar & Kismartini, 2020). Sistem E-Musrenbang telah digunakan dengan sukses di banyak daerah, termasuk Surabaya, Tangerang Selatan, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, dan bahkan Bappenas, dalam perencanaan pembangunan nasional.

Namun, dalam pelaksanaannya sendiri E-Musrenbang juga mengalami beberapa hambatan seperti rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Salah satu strategi untuk mengidentifikasi masalah terkait rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam E-Musrenbang adalah menggunakan strategi Problem Tree Analysis. Problem tree analysis adalah salah satu alat yang digunakan untuk memetakan suatu masalah bersamaan dengan sebab dan akibatnya dan dapat digunakan untuk mencari strategi dalam mencapai suatu tujuan. Rancangan problem tree analysis ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah, sebab dan akibat dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam E-Musrenbang di Kota Surabaya. Keunggulan menggunakan strategi PTA ini yaitu, karena bisa menggambarkan permasalahan dengan jelas sehingga pembuat kebijakan bisa mendapat pemahaman yang mendalam. PTA juga membantu pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan dalam memilih solusi yang tepat sasaran dan memiliki dampak jangka panjang yang positif. Oleh karena itu, makalah ini ditulis untuk menjelaskan strategi problem tree analysis dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam E-Musrenbang di Kota Surabaya.

METODE

Studi ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif, sumber datanya adalah studi literatur. Penelitian ini menggunakan metode ini karena tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan implementasi kebijakan musyawarah perencanaan pembangunan elektronik di Kota Surabaya. Metode ini juga menggunakan Analysis of Problem Trees, yang merupakan metode perencanaan berdasarkan kebutuhan. Analisis masalah terkait dengan subjek, analisis dampak masalah, dan perumusan solusi terbaik adalah tiga tahapan dari proses Problem Tree Analysis ini. Hasil utama dari teknik perencanaan ini adalah diagram berbentuk daun, dengan batang pohon sebagai fokus masalah dan akar sebagai penyebab masalah. dan cabangnya berupa dampak dari masalah tersebut.



Gambar 1 Struktur Diagram Problem Tree Analysis

Mekanisme penggunaan Problem Tree Analysis dilakukan untuk menganalisis faktor sebab akibat yang mempengaruhi implementasi e musrenbang terhadap perencanaan pembangunan, selanjutnya akan ditarik kesimpulan untuk memudahkan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Elektronik Musyawarah Rencana Pembangunan

E-Musrenbang adalah sistem perencanaan pembangunan nasional yang mengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun, dimana usulan pembangunan masyarakat difasilitasi melalui sistem aplikasi online daripada dilakukan secara manual. Istilah "musrenbang" telah menjadi sangat populer dalam proses perencanaan pembangunan. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 21 menyatakan bahwa musrenbang berfungsi sebagai forum bagi orang-orang yang terlibat dalam pembuatan rencana pembangunan nasional dan daerah. Selanjutnya, ayat 2 pasal 2 menyatakan bahwa rencana pembangunan daerah setiap daerah harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan.

Dengan memiliki jenjang perencanaan yang berbeda, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yaitu perencanaan jangka panjang daerah yang disingkat RPJPD untuk periode 20 tahun (pasal 1 ayat 9), selanjutnya rencana jangka menengah daerah yang disebut (RPJMD) untuk periode 5 tahun (pasal 1 ayat 16) Pelaksanaan musrenbang dilakukan secara berjenjang dari tingkat bawah hingga atas.

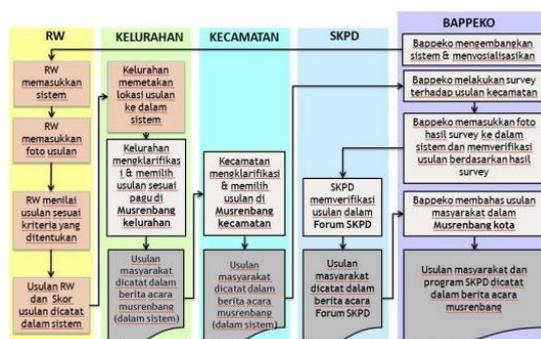
Dengan memungkinkan penyusunan rancangan awal RKPD dan meningkatkan efisiensi dan kinerja proses Musrenbang mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten, aplikasi E-Musrenbang menawarkan berbagai keunggulan. Keunggulan-keunggulan tersebut meliputi:

- Alur tahapan Musrenbang yang sistematis: Aplikasi ini memandu proses Musrenbang melalui tahapan yang jelas dan terstruktur, mulai dari Musrenbang di tingkat kecamatan, kabupaten, hingga penyusunan rancangan awal RKPD.
- Manajemen penjadwalan: Fitur penjadwalan membantu mengatur dan melacak timeline setiap tahapan Musrenbang, memastikan kelancaran dan ketepatan waktu pelaksanaan.

- Verifikasi usulan: Tersedia fasilitas untuk memverifikasi usulan yang diajukan, menjamin validitas dan kredibilitas data usulan.
- Pengarsipan usulan: Usulan yang tidak disetujui diarsipkan dengan rapi, sehingga mudah dicari dan ditelusuri di masa depan.
- Migrasi data antar tahapan: Migrasi data dilakukan secara otomatis, menghindari entri data ganda yang dapat menyebabkan inkonsistensi data.
- Akomodasi usulan dari berbagai tingkatan: Aplikasi ini memungkinkan pengajuan usulan dari berbagai tingkatan, mulai dari desa, kelurahan, dan kecamatan.
- Agregasi usulan: Modul agregasi membantu memetakan usulan-usulan ke dalam format program dan kegiatan, memudahkan analisis dan pengelompokan usulan.
- Cetak data: Tersedia fitur cetak data dengan berbagai format laporan, memungkinkan penyajian data yang informatif dan mudah dipahami.
- Integrasi dengan E-Planning (SIPD): Aplikasi ini dapat diintegrasikan dengan E-Planning (SIPD) untuk meminimalisir entri data ganda dan meningkatkan efisiensi.
- Modul tanya jawab: Modul ini memungkinkan interaksi antar pengguna aplikasi, memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi.

Dengan keunggulan-keunggulan ini, aplikasi E-Musrenbang membantu Bappeda dalam menjalankan fungsinya secara optimal sebagai perencana, pengendali, dan evaluator. Sistem ini secara otomatis menyusun proses Musrenbang, menghasilkan output informatif bagi berbagai pihak, dan membantu pemerintah dalam menyelaraskan, mengklarifikasi, dan menyepakati usulan rencana kegiatan terhadap rancangan RKPD Kabupaten/Kota.

Surabaya adalah salah satu kota yang menggunakan musrenbang untuk merencanakan pembangunan. Mulai tahun 2009, Surabaya menggunakan e-musrenbang. Namun, sistem pelaksanaan musrenbang telah berubah sejak Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 dikeluarkan. Ini berbeda dengan sistem yang digunakan sebelumnya, yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2016. Mekanisme yang digunakan dalam pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya merupakan perbedaan yang signifikan antara keduanya. Pada musrenbang tahun 2018, tahap paling dasar adalah kegiatan rembuk warga di tingkat kelurahan. Berbeda dengan musrenbang tahun sebelumnya, yang dimulai dari tingkat RW,, musrenbang Kota Surabaya tahun 2018 dilaksanakan secara praktis dalam 4 tahapan. Oleh karena itu, musrenbang dan sistem elektroniknya tidak terlepas dari sejumlah masalah. Meskipun sistem online digunakan, pelaksanaan musrenbang masih dapat menyebabkan kesalahan dalam perencanaan pembangunan. Meskipun usulan datang dari masyarakat melalui rembug kelurahan, pemerintah kecamatan, SKPD, pemkot, dan legislatif memvalidasi proposal dalam musrenbang. Dengan kata lain, banyak usulan tingkat kelurahan yang diajukan oleh LPMK dan RW tampaknya tidak mendapat persetujuan. Ini terjadi meskipun usulan-usulan ini sangat penting bagi masyarakat. Selain itu, hasil lapangan menunjukkan bahwa banyak usulan yang belum dilaksanakan dan tidak ada komunikasi antara tingkatan musrenbang dengan dinas terkait.



Gambar 2 Alur Kerja E-Musrenbang

Sumber : Dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2014

Setiap kelurahan, kecamatan, dan OPD akan memiliki akses ke akun mereka di www.musrenbang.surabaya.go.id untuk mengajukan, meninjau, atau merevisi proposal.

Bagi Kota Surabaya, adanya penerapan e-musrenbang ini menjadi salah satu wadah dalam pencapaian prinsip good governance yang dikemukakan oleh United Nation Development Program (UNDP), Prinsip-prinsip tersebut dalam konteks good governance terdiri atas legitimacy and voice (mencakup partisipasi dan berorientasi pada kesepakatan), direction (visi strategis), performance (tanggung jawab serta efektivitas dan efisiensi), accountability (akuntabilitas dan transparansi), dan fairness (kepastian hukum dan keadilan) (Setyasa, 2019). E-musrenbang memiliki posisi yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan bottom-up di Kota Surabaya karena memungkinkan partisipasi masyarakat dari segala tingkatan untuk memberikan aspirasi terkait pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam penelitian ini sistem musyawarah perencanaan pembangunan daerah yang menjadi lokusnya adalah Kota Surabaya. Prasetyono dkk dalam Astuti dan Andriyani (2019) mengatakan dalam hasil penelitiannya tentang pelaksanaan musrenbang di kota surabaya bahwa dengan kebutuhan yang semakin besar dan harus menjangkau dan membuka ruang yang lebih luas untuk ruang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah di kota Surabaya penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) daerah yang selama ini menggunakan instrument manual seiring waktu ternyata menimbulkan berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Kendala-kendala tersebut antara lain seperti penyajian data yang kurang akurat, kurangnya transparansi dan akuntabilitas data usulan yang masuk dari masyarakat sehingga masyarakat kesulitan untuk mengetahui apakah usulan kegiatan di wilayahnya telah terakomodir di dalam APBD atau belum. Selain itu Kendala lainnya seperti waktu rekapitulasi data usulan yang menghabiskan waktu yang cukup lama, kesulitan mengakomodir aspirasi dan keterwakilan usulan dari berbagai kebutuhan dan lapisan masyarakat, sehingga memungkinkan untuk muncul peluang terjadinya penyimpangan dalam perencanaan pembangunan, sebagai contoh seperti sikap atau tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok kepentingan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses kebijakan publik. Serta adanya indikasi bahwa banyak usulan masyarakat yang tidak dilakukan validasi oleh aparat pemerintah yang bertugas di tingkat kecamatan meskipun usulan yang diajukan tersebut merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat, Prasetyono dkk dalam Astuti dan Andriyani (2019).

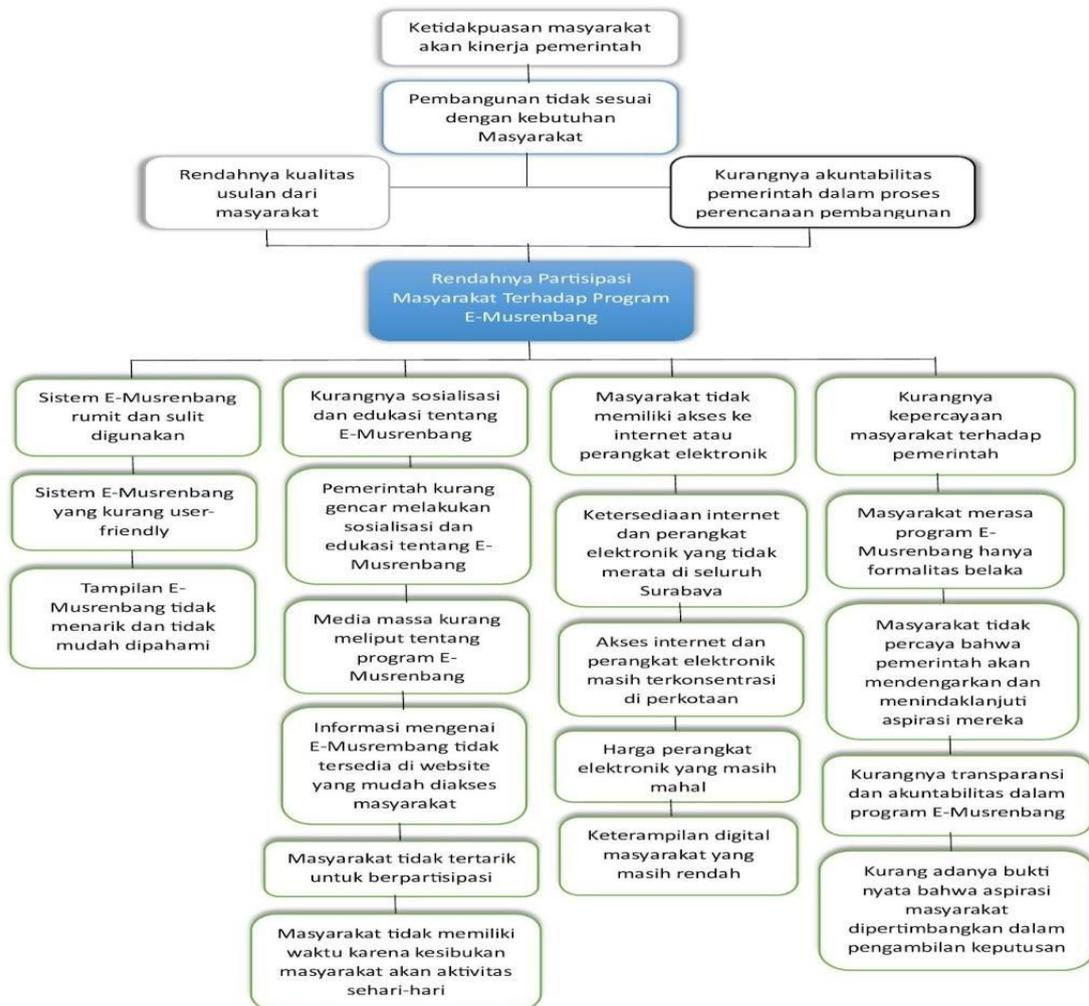
Problem Tree Analysis

Problem Tree Analysis, alat analisis yang biasa digunakan dalam penelitian ini, adalah alat yang digunakan untuk mengkomunikasikan ide dan gagasan kepada orang lain serta untuk merepresentasikan masalah. Metode ini memungkinkan pembaca untuk memahami apa yang terjadi (masalah utama), penyebabnya (penyebab masalah), dan hubungan sebab-akibatnya.

Banyak istilah yang digunakan sebagai pengertian analisis pohon masalah. Miller (2004) Dalam (Hindri, 2019) menggunakan istilah issues trees. Lebih lanjut, Miller menyatakan issues trees merupakan pendekatan yang membantu merinci suatu masalah ke dalam komponen-komponen penyebab utama dalam rangka menciptakan rencana kerja proyek. Silverman (1994) Dalam (Hindri, 2019) menggunakan istilah tree diagram dan menyatakan diagram sistematis atau diagram pohon dirancang untuk mengurutkan hubungan sebab-akibat. Modul Pola Kerja Terpadu (2008) dalam (Hindri, 2019) menggunakan istilah pohon masalah yang merupakan bagian dari analisis pohon. Analisis pohon merupakan suatu langkah pemecahan masalah dengan mencari sebab dari suatu akibat. Lebih lanjut, Modul Pola kerja Terpadu menguraikan pohon masalah sebagai suatu teknik yang dapat mengidentifikasi semua masalah dalam suatu keadaan tertentu dan memperagakan informasi ini sebagai rangkaian hubungan sebab akibat.

Analisis pohon masalah menawarkan sejumlah manfaat sebagai dasar analisis, termasuk (a) pemahaman dasar masalah, (b) bantuan dalam pengambilan keputusan yang tepat, (c) peningkatan efisiensi pemecahan masalah, (d) peningkatan komunikasi dan kerja sama, dan (e) peningkatan kemampuan berpikir kritis. Dengan menggunakan analisis pohon masalah ini, kita dapat membuat keputusan terbaik berdasarkan informasi dan data yang ada.

Lima tahapan analisis digunakan dalam analisis pohon masalah. Pertama, masalah utama atau masalah prioritas dirumuskan. Kemudian, metode lima alasan digunakan untuk mempelajari penyebab munculnya masalah. Tahap ketiga melihat bagaimana masalah utama mempengaruhi stakeholder. Dalam tahap empat, hubungan antara masalah utama, faktor-faktor yang menyebabkan masalah, dan dampak pada objek yang diteliti ditunjukkan. Problem tree analysis memiliki keuntungan bahwa ia membantu pembuat kebijakan memahami akar masalah sehingga mereka dapat membuat kebijakan yang lebih baik dan mengidentifikasi risiko dan hambatan untuk mengambil tindakan antisipasi. Kekurangan dari metode ini adalah bahwa ia hanya berfokus pada masalah tanpa mempertimbangkan faktor pendukung atau solusi potensial yang sudah ada sebelumnya dan hanya dapat menemukan faktor faktor yang sudah ada.



Gambar 3 Diagram Problem Tree Analysis Permasalahan E-Musrenbang Surabaya

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan menggunakan analisis problem tree, kami menemukan beberapa masalah akibatnya, masyarakat Surabaya kurang terlibat dalam program E-Musrenbang untuk mendukung proses perencanaan pembangunan kota. Beberapa masalah diantaranya karena kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang program E-Musrenbang, tidak semua masyarakat memiliki akses ke internet, sistem E-Musrenbang dianggap rumit dan sulit digunakan oleh kebanyakan masyarakat awam, dan terakhir yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat akan pemerintah.

Kurangnya sosialisasi dan edukasi dari Bappeko ke masyarakat langsung mengenai E-Musrenbang dan cara penggunaannya, mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat terhadap program E-Musrenbang rendah. Belum lagi tidak banyak media yang meliput program ini dan juga informasi mengenai E-Musrenbang tidak bisa diakses di web yang mudah dikunjungi masyarakat. Sehingga, masyarakat minim sekali informasi mengenai program ini dan menurunkan minat mereka untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan di kota Surabaya.

Selanjutnya, tidak semua masyarakat memiliki perangkat elektronik yang bisa mengakses internet dan juga ketersediaan jaringan internet yang masih berpusat di perkotaan dan mengabaikan daerah pinggiran. Banyak faktor yang mempengaruhi kesulitan masyarakat dalam mengakses program E-Musrenbang, salah satunya faktor sosial ekonominya. Masih banyak kelompok masyarakat di kota Surabaya yang tidak mampu membeli perangkat elektronik karena harganya yang mahal dan pada akhirnya mengakibatkan rendahnya keterampilan digital masyarakat. Rendahnya keterampilan digital masyarakat juga yang menyulitkan masyarakat dalam proses berpartisipasi dalam E-Musrenbang. Karenanya banyak yang bilang sistem dan tampilan website E-Musrenbang tidak user-Friendly dikarenakan mereka kesusahan dalam memahami dan menggunakan aplikasi E-Musrenbang.

Permasalahan terakhir yang kami temukan yaitu adanya persepsi bahwa pemerintah tidak akan mendengarkan dan mewujudkan aspirasi dari partisipasi masyarakat. didukung minimnya bukti nyata bahwa aspirasi yang diberikan masyarakat didengarkan dan diwujudkan. Sehingga hal tersebut menyebabkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah menurun.

Dari pemaparan mengenai analisis permasalahan akan rendahnya partisipasi masyarakat Surabaya dalam program E-Musrenbang diatas, maka ada beberapa sektor/ bidang yang perlu dijadikan sebagai area penguatan yaitu, SDM dan infrastruktur.

1. SDM

Dalam SDM beberapa hal yang perlu ditingkatkan yaitu kapasitas masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk berpartisipasi dalam E-Musrenbang, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam E-Musrenbang dan manfaatnya bagi pembangunan daerah, terakhir penguatan kelembagaan dengan Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam E-Musrenbang.

2. Infrastruktur

Infrastruktur menjadi salah satu permasalahan yang dominan dalam rendahnya partisipasi masyarakat dalam program E-Musrenbang. Beberapa hal yang dapat ditingkatkan untuk mendorong naiknya tingkat partisipasi masyarakat yaitu memperluas akses internet dan perangkat elektronik di daerah pedesaan dan terpencil dan juga menyediakan infrastruktur TIK yang memadai di kantor desa, kelurahan, dan kecamatan untuk mendukung pelaksanaan E-Musrenbang.

Dengan memperkuat SDM dan infrastruktur di berbagai tingkatan, diharapkan partisipasi masyarakat dalam program E-Musrenbang dapat meningkat secara signifikan. Hal ini akan berkontribusi pada proses perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan tentang Analisis Implementasi E-Musrenbang terhadap Perencanaan Pembangunan di Kota Surabaya dengan pendekatan Problem Tree Analysis dan menggunakan teori rasional. Pengambilan keputusan rasional adalah proses memilih solusi terbaik dengan menggunakan logika dan pemikiran yang terstruktur. Proses ini melibatkan analisis situasi dan keputusan yang cermat untuk mencapai hasil yang optimal dalam batasan yang ada. maka hal tersebut Musrenbang adalah sistem perencanaan yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang pembangunan dengan menggunakan pendekatan dari bawah ke atas.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan menggunakan analisis problem tree, kami menemukan beberapa masalah yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat Surabaya dalam program E-Musrenbang dalam mendukung proses perencanaan pembangunan di kota Surabaya. Beberapa masalah diantaranya karena kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang program E-Musrenbang, tidak semua masyarakat memiliki akses ke internet, sistem E-Musrenbang dianggap rumit dan sulit digunakan oleh kebanyakan masyarakat awam, dan terakhir yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat akan pemerintah.

Dari pemaparan mengenai analisis permasalahan akan rendahnya partisipasi masyarakat Surabaya dalam program E-Musrenbang diatas, maka ada beberapa sektor/ bidang yang perlu dijadikan sebagai area penguatan yaitu, SDM dan infrastruktur. Dengan memperkuat SDM dan infrastruktur di berbagai tingkatan, diharapkan partisipasi masyarakat dalam program E-Musrenbang dapat meningkat secara signifikan. Hal ini akan berkontribusi pada proses perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

SARAN

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam E-Musrenbang
 - Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang E-Musrenbang secara gencar melalui berbagai media seperti seminar dan workshop di kelurahan maupun kecamatan
 - Dengan memastikan informasi yang disampaikan mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
2. Menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat dalam penggunaan platform E-Musrenbang
 - Mengadakan pelatihan tentang penggunaan platform ini secara berkala seperti pelatihan tatap muka, online dan berbasis video tutorial dengan menyesuaikan format pelatihan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dan juga melibatkan instruktur atau pengajar yang kompeten dan berpengalaman
 - memberikan pendampingan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam penggunaan platform dan membuka layanan helpdesk untuk menjawab pertanyaan dan menyelesaikan masalah terkait E-Musrenbang
3. Memperluas akses internet diseluruh wilayah Kota Surabaya
4. Meningkatkan kualitas data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan pembangunan
5. Membangun sistem monitoring dan evaluasi untuk memantau efektivitas implementasi E-Musrenbang
 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam implementasi E-Musrenbang dengan memastikan dijalankan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Albaqiatussaliha, M. (2019, Juli). Kerangka Pengambilan Keputusan.
- Budi, S. (2010, April 1). PELAKSANAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN U.U. NO. 32 TAHUN 2004. *Wacana Hukum, IX*.
- Hafidah, A. S., Handoko, V. R., Maryono, Sukristyanto, A., & Murniati. (2022, Agustus). REFORMASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK GOVERMENT "Studi Kasus Surabaya Smart City". *Jurnal Penelitian Ilmu Sejarah, Sosial dan Budaya, 1*.
- Rafinzar, R., & Kismartini. (2020, Agustus). Inovasi E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Faktor Pendukung Dan Penghambat Program E-Mussrenbang Kota Surabaya). *Jurnal Administrasi Publik, 6*.
- Rizkiya, P., Zainuddin, & Ikram, A. D. (2023, Agustus). Dampak penerapan e-Musrenbang terhadap proses perencanaan pembangunan di kota Banda Aceh, Indonesia. *Jurnal Geuthè: Penelitian Multidisiplin, 6*, 140-146.
- Setyasa, P. T. (2019). Penilaian Tingkat Transparansi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Surabaya. *JURNAL PENATAAN RUANG, 14*, 1907-4972.
- Yunas, N. S. (2017, April). Efektivitas E-Musrenbang di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Berparadigma Masyarakat. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 7*
- Astuti, S. J. W., & Andriyani, N. K. (2019). Perencanaan Pembangunan (E-Musrenbang) Dengan Menggunakan Metode Importance Performance Analysis (Ipa) di Kota Surabaya. *GOVERNANCE: Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik, 9(2)*, 46-53.